

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas dan kaya akan sumber daya. Secara geopolitik Indonesia berada pada posisi strategis, terletak di antara pertemuan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Lokasi ini merupakan persimpangan perdagangan perairan dan politik internasional. Presiden Indonesia Joko Widodo menyadari potensi kelautan Indonesia dan bertekad untuk memanfaatkan potensi kelautan Indonesia untuk perkembangan politik, ekonomi, sumber daya dan keamanan kelautan, sehingga Indonesia mampu menjadi kekuatan politik dan diplomasi kelautan yang disegani di kawasan. Visi tersebut kemudian diterapkan dalam wujud doktrin kelautan Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia.

Penerapan kebijakan pada era Jokowi merupakan langkah baru yang berbeda dari kepemimpinan presiden Indonesia pada periode sebelumnya, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Yudhoyono mencetuskan kebijakan luar negeri *Thousand Friends, Zero Enemies*, sementara Presiden Joko Widodo melakukan pendekatan yang bisa dibilang memaksa, setidaknya dalam permasalahan kelautan.

Dari pelaksanaan kebijakan kelautan Jokowi, secara implisit dapat dilihat Indonesia lebih mengutamakan keamanan kelautan dan menunjukkan statusnya

sebagai negara kelautan yang berdaulat. Pendekatan yang bersifat memaksa dan penegakkan hukum kelautan dengan menggunakan kekuatan dapat diartikan Indonesia lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya.

Dari penjelasan di atas, penulis dapat melihat beberapa ciri-ciri terapan realisme dalam penerapan kebijakan Joko Widodo terhadap permasalahan kelautan, terutama dalam isu IUU Fishing. Di mana negara mengutamakan kepentingan nasionalnya dan memaksakan kehendaknya atas negara lain, atau melindungi kepentingan tersebut dengan kekuasaan atau kekuatan yang memaksa. Timbulnya konflik tentu saja merupakan hal yang terelakkan dalam perspektif realisme yang memandang sistem Internasional secara anarki, yang berarti semua negara harus berjuang untuk kepentingannya sendiri karena tidak ada kekuatan lebih tinggi yang mengatur hubungan antar-negara tersebut.

5.2. Saran

Implementasi dari doktrin kelautan Joko Widodo dan penerapannya melalui kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti masih menyisakan jalan yang panjang bagi Indonesia. Sebab pemerintahan Joko Widodo masih belum berakhir dan tidak adanya jaminan pemerintahan selanjutnya akan memaksimalkan potensi kelautan seperti yang di-visikan oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk itu penulis menyarankan bagi penelitian lebih lanjut untuk membahas tentang perkembangan doktrin kelautan Joko Widodo setelah masa pemerintahannya berakhir dan bagaimana potensi perkembangan kelautan Indonesia kedepannya.